

ABSTRAK

Keberadaan Putusan Moratorium Utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura kepada PT Pan Brothers, mengakibatkan para krediturnya tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap utang yang dimiliki PT Pan Brothers. Pemberian moratorium utang ini juga mengakibatkan ditolaknya permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Maybank Indonesia atas utang dari PT Pan Brothers. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan untuk menganalisis adanya potensi tumpang tindih antara permohonan PKPU dengan putusan moratorium yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura sebagai upaya penyelesaian permasalahan utang-piutang. Fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Singapura Nomor HC/OS 515/2021 sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga di Indonesia dilakukan untuk menghindari tumpang tindihnya mekanisme penyelesaian utang-piutang yang sedang berlangsung antara PT Maybank Indonesia dengan PT Pan Brothers. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur tetap diperlukan agar hak mereka atas piutang tidak hilang akibat pemberian moratorium utang kepada debitur.

Kata kunci: Moratorium Utang, PKPU, Penyelesaian Utang-Piutang.

ABSTRACT

The existence of the Debt Moratorium Decision issued by the Singapore High Court to PT Pan Brothers, resulted in its creditors being unable to take legal action against the debt of PT Pan Brothers even though the debt was due and collectible. The granting of this moratorium also resulted in the rejection of the PKPU application submitted by PT Maybank Indonesia for the debt of PT Pan Brothers. This research uses a normative juridical method with a decision study approach to analyze the potential overlap between the PKPU application and the moratorium decision issued by the Singapore High Court. The focus of this research is Putusan PKPU Number 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst and Singapore High Court Decision Number HC/OS 515/2021 as primary legal materials. The results showed that the rejection of the PKPU application by the Commercial Court in Indonesia was carried out to avoid overlap between the ongoing debt settlement mechanisms between PT Maybank Indonesia and PT Pan Brothers. However, legal protection for creditors is still needed so that their rights to receivables are not lost due to the granting of a debt moratorium to the debtor.

Keywords: Debt Moratorium, PKPU, Debt Settlement.